



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat, taufik, dan nikmat-Nya Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BHHK–BATAN) dapat menyelesaikan kegiatan dan menyusun Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan Laporan Tahunan ini mengacu pada Peraturan Kepala BATAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan APBN BATAN. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Laporan ini merupakan rangkuman dari hasil pelaksanaan kegiatan BHHK tahun 2017 yang mencakup uraian tentang visi, misi, tujuan, sasaran, target, dan hasil capaian kegiatan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh BHHK dalam mendukung tugas dan fungsi BATAN sebagai lembaga litbang nuklir dalam lingkup layanan hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, keamanan dan pengamanan nuklir. Disamping itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja BHHK pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Jakarta, 30 Januari 2018
Kepala Biro Hukum, Hubungan
Masyarakat, dan Kerja Sama,

Ir. Eko Madi Parmanto
NIP: 19620316 198603 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Laporan Ringkas	3
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Dasar Hukum	6
1.2. Tujuan Pokok dan fungsi	6
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	7
1.4. Sumber Daya Manusia	8
1.5. Sarana dan Prasarana	10
1.6. Rencana Strategis	13
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SERTA HASIL YANG DICAPAI	15
2.1. Kegiatan	15
2.2. Anggaran	16
2.3. Kendala dan Tindak Lanjut	19
BAB III KEGIATAN PENDUKUNG DAN HASIL YANG DICAPAI	23
BAB IV PENUTUP	25
Lampiran-lampiran:	
Lampiran 1. Sumber Daya manusia	
Lampiran 2. Rekapitulasi Pendidikan dan Pelatihan	
Lampiran 3. Fasilitas	
Lampiran 4. Keikutsertaan Pegawai dalam Seminar/Semiloka/Lokakarya/Workshop	
Lampiran 5. Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri	
Lampiran 6. Pegawai yang Memperoleh Penghargaan	
Lampiran 7. Usulan HKI Terdaftar Tahun 2017	
Lampiran 8. Daftar Sertifikat Paten Terbayar (Paten Granted)	
Lampiran 9. Pegawai yang Melanjutkan Program Pendidikan S2 Dalam Negeri	



LAPORAN RINGKAS (EXECUTIVE SUMMARY)

BHHK adalah unit kerja di bawah koordinasi Sekretaris Utama (Sestama) yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan pelaksanaan keamanan nuklir. Dalam mendukung pelaksanaan tugas, BHHK didukung oleh 4 (empat) Bagian, yaitu Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kerja Sama, dan Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir. Secara garis besar tugas dan fungsi BHHK mencakup:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
- b. pelaksanaan hubungan antarlembaga, media dan pengelolaan informasi publik;
- c. pelaksanaan perjanjian dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- d. pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Selain tugas pokok yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2017 BHHK memiliki tugas lain untuk mendukung program unggulan BATAN, yaitu pengelolaan IAEA *Collaborating Center*, pengembangan kerja sama dan penyusunan dokumen desain sistem proteksi fisik pembangunan Reaktor Daya Eksperimental (RDE) dan penyusunan naskah rancangan Peraturan Kepala BATAN tentang *Clearing House* Teknologi Nuklir. Tugas lain yang tidak termasuk dalam penetapan kegiatan tahun 2017 adalah penyusunan bahan masukan untuk revisi Undang-Undang Ketenaganukliran (UUK) Nomor 10 Tahun 1997. Tugas pokok yang bersifat layanan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tugas lain yang terkait dengan program unggulan BATAN yang menjadi tanggung jawab BHHK selama tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perubahan terhadap target capaian harus dilakukan mengingat adanya pemotongan anggaran yang cukup besar. Kegiatan penyusunan rancangan revisi UUK yang tidak direncanakan tetapi harus dilakukan juga menambah beban BHHK, terutama dalam pembiayaan.

Dalam kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan tercapai 13 naskah yang berhasil diselesaikan dari 10 naskah yang ditargetkan, atau tercapai 130%. Target jumlah usulan HKI dan galur mutan harapan tercapai 12 usulan dari 9 yang ditargetkan, atau tercapai 133%. Terkait dengan layanan bantuan hukum telah tercapai 1 laporan dari 1 laporan yang ditargetkan atau tercapai 100%.



Pada kegiatan penyediaan informasi telah dilaksanakan 19 kali konferensi pers dari 24 yang direncanakan. Penurunan jumlah kegiatan konferensi pers menjadi 19 kali sudah disesuaikan dengan adanya pemotongan anggaran dan tercapai 100%. Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan layanan informasi publik meskipun ada penurunan anggaran, tidak mengganggu terhadap target capaian yang sudah direncanakan. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) naik menjadi 3,2 dari target 3,17 yang direncanakan. Selain kenaikan IKM, pengelolaan layanan informasi publik yang dilaksanakan BHHK meraih prestasi peringkat pertama untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi BATAN.

Kegiatan perjanjian kerja sama telah tercapai 1 dokumen perjanjian kerja sama dari 1 dokumen yang ditargetkan atau tercapai 100%, sedangkan yang terkait dengan pembangunan RDE tercapai 1 dokumen perjanjian kerja sama dari 1 dokumen yang ditargetkan, atau tercapai 100%. Dalam kegiatan pengelolaan kerja sama telah tercapai 1 laporan pengelolaan kerja sama dari 1 laporan yang ditargetkan atau tercapai 100%, sedangkan terkait dengan kegiatan dokumen kerja sama IAEA *Collaborating Centre* telah tercapai 1 laporan pengelolaan IAEA CC dari 1 dokumen yang ditargetkan.

Terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem keamanan nuklir telah tercapai 1 dokumen pengembangan sistem keamanan nuklir dari 1 dokumen yang ditargetkan atau tercapai 100%, sedangkan terkait dengan pengelolaan pengamanan instalasi nuklir telah tercapai 1 dokumen pengelolaan pengamanan instalasi nuklir dari 1 dokumen yang ditargetkan atau tercapai 100%, dan penyusunan dokumen desain sistem proteksi fisik telah tercapai 1 dokumen rencana proteksi fisik RDE dari 1 dokumen yang ditargetkan atau tercapai 100%.

Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas pada awalnya BHHK mendapat pagu anggaran sebesar Rp2.361.912.000,00. Anggaran tersebut mengalami penurunan yang disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah mengenai efisiensi/pemotongan anggaran. Pagu BHHK setelah dilakukan pemotongan anggaran (APBNP) adalah sebesar Rp1.772.095.000,00. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran (SIPA), serapan anggaran BHHK tahun 2017 sebesar Rp1.770.793.737,00 atau tercapai sekitar 99,93 %.

Kendala yang dihadapi BHHK dalam pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran. Di bidang sumberdaya manusia masih ada tiga subbagian yang tidak memiliki staf sehingga mengganggu proses pelaksanaan kegiatan dan masih banyak



pegawai yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya. Sementara itu, anggaran yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan kurang memadai terutama setelah dilakukan pemotongan anggaran. Kendala yang dihadapi sudah diatasi dengan melibatkan personil dari unit kerja lain yang terkait dan kekurangan anggaran diatasi dengan melakukan penyesuaian target yang akan dicapai.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional, BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 telah ditetapkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 Tahun 2014, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN. BHHK adalah unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama yang merupakan unit pendukung di bidang pelayanan hukum, hubungan masyarakat, kerja sama, dan keamanan nuklir.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BHHK didukung oleh 4 (empat) Bagian yaitu Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kerja Sama, dan Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir. Bagian Hukum terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) Subbagian, Bagian Kerja Sama terdiri dari 3 (tiga) Subbagian, dan Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir terdiri dari 2 (dua) Subbagian.

1.2. Tujuan Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

BHHK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan pelaksanaan keamanan nuklir.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BHHK menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, serta pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;



- 2) pelaksanaan hubungan antar lembaga, media dan pengelolaan informasi publik;
- 3) pelaksanaan perjanjian dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;
- 4) pelaksanaan keamanan dan pengamanan nuklir; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN Nomor 16 tahun 2014, struktur organisasi BHHK terdiri atas:

a. Bagian Hukum;

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta pengelolaan dokumentasi hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) subbagian sebagai berikut:

- Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Subbagian Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dan pengelolaan dokumentasi hukum.

b. Bagian Hubungan Masyarakat;

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, media dan pengelolaan informasi publik, yang terdiri dari 2 (dua) subbagian sebagai berikut:

- Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Media mempunyai tugas melakukan urusan hubungan antar lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan media; dan
- Subbagian Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan informasi publik dan evaluasi pemberitaan.



c. Bagian Kerja Sama;

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perjanjian dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri, dan urusan tata usaha biro, yang terdiri dari 3 (tiga) subbagian sebagai berikut:

- Subbagian Perjanjian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri;
- Subbagian Pengelolaan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri; dan
- Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro.

d. Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir;

Bagian Keamanan dan Pengamanan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelaahan aspek teknis operasional konvensi internasional di bidang keamanan nuklir dan pelaksanaan koordinasi pengamanan instalasi dan bahan nuklir, serta pengamanan dalam, yang terdiri dari 2 (dua) subbagian sebagai berikut:

- Subbagian Keamanan Nuklir mempunyai tugas melakukan penelaahan aspek teknis operasional konvensi internasional di bidang keamanan nuklir; dan
- Subbagian Pengamanan Instalasi Nuklir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan instalasi dan bahan nuklir serta pengamanan dalam.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata Hubungan Masyarakat, dan Arsiparis.

1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama yang aktif sampai dengan akhir Tahun 2016 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang pegawai. Data pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 1.1. Berdasarkan Jumlah

No	Uraian	Ka. BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	1	9	8	11	8	37

Tabel 1.2. Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Ka. BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
1	Eselon II	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III	-	1	1	1	1	4
3	Eselon IV	-	3	2	3	2	10
Jumlah		1	4	3	4	3	15

Tabel 1.3. Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	4	-	-	-	4
2.	Perancang Peraturan Perundaang-Undangan Pertama	1	-	-	-	1
3.	Pranata Humas Madya	-	2	-	-	2
5.	Pranata Humas Pertama	-	2	-	-	2
6.	Pranata Humas Mahir	-	1	-	-	1
7.	Arsiparis Penyelia	-	-	1	-	1
8.	Pranata Nuklir Penyelia	-	-	-	2	2
Jumlah		5	5	1	2	13

Tabel 1.4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Ka. BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
1	Laki-laki	1	6	2	6	7	22
2	Perempuan	-	3	6	5	1	15
Jumlah		-	9	8	11	8	37

Tabel 1.5. Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Ka. BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
1	IV	1	5	2	1	1	10
2	III	-	4	6	10	7	27
Jumlah		1	9	8	11	8	37

Tabel 1.6. Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Ka. BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
1	Doktor (S3)	-	-	-	-	-	-
2	Pasca Sarjana (S2)	-	2	1	2	-	5
3	Sarjana (S1)	1	7	5	6	2	21
4	Diploma IV	-	-	-	-	2	2
5	Diploma III	-	-	2	1	1	4
6	Diploma I	-	-	-	-	1	1
7	SLTA	-	-	-	2	2	4
Jumlah		1	9	8	11	8	37

1.5. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BHHK memiliki atau didukung dengan sarana dan prasarana serta peralatan kantor, untuk menunjang kegiatan sebagai berikut:

No	Nama	Ka. BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
1.	Ruang kerja	1	1	1	1	1	5
2.	Ruang rapat	-	-	-	-	1	1
3.	Ruang informasi dan media center	-	-	1	-	-	1
4.	Ruang dokumentasi hukum	-	1	-	-	-	1
5.	lemari dan rak informasi	-	-	3	-	-	3
6.	Meja informasi	-	-	2 set	-	-	2 set
7.	Meja ruang media informasi	-	-	1 set	-	-	1 set
8.	Meja kerja	4	11	10	18	13	56

No	Nama	Ka. BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
9.	Kursi kerja	11	15	10	22	13	71
10.	Kursi lipat	-	-	-	3	10	13
11.	Televisi	1	-	1	-	-	2
12.	Filing kabinet	-	8	3	25	6	33
13.	Lemari besi	1	9	1	7	6	24
14.	Lemari buku	1	6	-	3	2	12
15.	Loker	-	-	-	1	-	1
16.	LCD monitor informasi	-	-	3	-	-	3
17.	LCD Projector	-	2	2	2	2	8
18.	Laptop	2	6	4	9	9	30
19.	PC all in one	1	6	3	9	4	23
20.	PC Desktop	-	3	3	5	2	13
21.	Handycam	1	-	1	1	1	4
22.	Camera digital	2	2	4	4	4	16
23.	Printer Hitam putih	-	5	4	8	4	21
24.	Printer warna	1	4	1	5	1	12
25.	Printer all in one	1	-	1	1	1	4
26.	Digital voice recorder	-	-	2	3	3	8
27.	External hardisk	1	3	-	6	7	20
28.	Mesin ketik elektrik	-	-	-	2	-	2
29.	Mesin ketik manual	-	-	-	1	-	1
30.	Mesin penghancur kertas	-	1	1	2	-	3
31.	Troly	-	-	-	1	-	1
32.	Scanner	-	1	4	4	2	10
33.	Dispenser	-	1	-	-	-	1
34.	Kulkas	-	-	-	1	-	1
35.	Coffee maker	-	-	1	-	-	1
36.	Sepeda motor	-	-	-	4	1	5
37.	Kendaraan roda 4	1	-	-	1	-	2



No	Nama	Ka. BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jumlah
38.	Tablet	-	-	2	-	-	2
39.	Dry cabinet	-	-	1	-	-	1

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, pada tahun 2016 BHHK melakukan pembelian barang inventaris kantor sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jenis/Merk	Jumlah	Pengguna
1.	Laptop	Asus Vivo book Flip TP301UJ	1 unit	Bagian Hukum
2.	PC All in One	Lenovo	1	Bagian Kerja Sama
3.	Voice Recorder	Sony	1	TU Biro
4.	Laptop	Lenovo Ideapad Yoga 700	1	TU Biro
5.	Kamera Digital	Canon Power Shot SX620HS	1	TU Biro
6.	Scanner	Canon DR-C240	1	TU Biro
7.	External hardisk	Toshiba 3 TB	1	TU Biro
8.	External hardisk	Seagate 2 TB	1	TU Biro

1.6. Rencana Strategis

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT
1.	BATAN unggul di tingkat regional berperan dalam percepatan kesejahteraan menuju kemandirian bangsa	Meningkatkan layanan hukum dalam pelaksanaan kegiatan litbangyasa dan pemanfaatan Iptek nuklir di berbagai bidang untuk menjamin kepastian hukum	Meningkatkan mutu layanan perlindungan hukum dalam pemanfaatan iptek nuklir.	Terwujudnya pelayanan hukum dan aspek legal pelaksanaan dan pendayagunaan iptek nuklir.	Dokumen legal penunjang pelaksanaan dan pendayagunaan iptek nuklir	
					1. Penyiapan naskah rancangan peraturan perundang-undangan	Naskah rancangan peraturan perundang undangan
					2. Penyiapan naskah rancangan usulan HKI bidang Iptek nuklir	Naskah rancangan usulan HKI Bidang iptek Nuklir
					3. Penyusunan naskah rancangan usulan galur mutan harapan tanaman pangan dan hortikultura	Naskah rancangan Usulan Galur Mutan Harapan Tanaman Pangan dan Holtikultura
					4. Penyusunan naskah konsepsi clearing house iptek nuklir	Naskah konsepsi clearing house iptek nuklir
Layanan bantuan hukum dan dokumentasi hukum	Laporan layanan bantuan hukum					
2.		Meningkatkan penyebaran informasi melalui jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga dan media, serta pengelolaan informasi publik	Meningkatkan komunikasi dengan media dan lembaga dalam pemberian informasi kepada masyarakat	Terwujudnya penyediaan informasi ketenaganukliran kepada publik	Layanan hubungan masyarakat	
					1. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
					2. Pengelolaan konten website BATAN	Laporan pengelolaan konten web BATAN
					3. Pemberitaan iptek nuklir melalui antar lembaga dan media	Laporan pemberitaan iptek nuklir melalui hubungan antar lembaga dan media
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KIP					
3.		Meningkatkan layanan perumusan dan pengelolaan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak	Meningkatkan jejaring kerja sama yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan	Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama iptek nuklir dalam dan luar negeri	Dokumen kerja sama iptek nuklir	
					1. Penyiapan perjanjian kerja sama	Dokumen perjanjian kerja sama
					2. Pengelolaan kerja sama	Laporan pengelolaan kerja sama
					3. Pengelolaan kerja sama IAEA collaborating Center	Dokumen kerja sama IAEA Collaborating Center
					Dokumen kerja sama terkait pembangunan RDE Perkantoran	Dokumen kerja sama terkait pembangunan RDE
Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran	Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran					



NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT
4.		Meningkatkan koordinasi pengelolaan pengamanan instalasi nuklir dan penerapan sistem keamanan nuklir	Menjamin pemanfaatan iptek nuklir berjalan dengan aman	Terwujudnya keamanan dan pengamanan instalasi nuklir	Pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir	
					1. Pengembangan sistem keamanan nuklir	Dokumen Pengembangan Sistem Keamanan Nuklir
					2. Pengelolaan pengamanan instalasi nuklir	Laporan pengelolaan pengamanan instalasi nuklir
					Penyusunan dokumen sistem proteksi fisik RDE	Dokumen Rencana Proteksi Fisik Reaktor Daya Eksperimental (RDE)



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN SERTA HASIL YANG DICAPAI

1.1. Kegiatan

Pada Tahun 2017, BHHK melakukan kegiatan meliputi penyelenggaraan layanan hukum, penyelenggaraan hubungan masyarakat, pengelolaan kerja sama dan ketatausahaan, serta pengelolaan keamanan dan pengamanan nuklir. Adapun target dan realisasi kegiatan tahun 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.1 Target dan Realisasi Kegiatan

No	Output/Sub Output/Komponen	Target Tahun 2017		Realisasi Tahun 2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Legal Penunjang Pelaksanaan dan Pendayagunaan Iptek Nuklir				
	1.1. Naskah Rancangan Usulan HKI Bidang Iptek Nuklir	9 NR	100	12 NR	133
	1.2. Naskah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	10 NR	100	13 NR	130
	1.3. Naskah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Clearing House Iptek Nuklir	1 NR	100	1 NR	100
	1.4. Dokumen Persetujuan Etik Penggunaan dan Pemeliharaan Hewan Percobaan	1 NR	100	1 NR	100
2.	Laporan Layanan Bantuan Hukum	1 lap	100	1 lap	100
3.	Laporan Layanan Hubungan Masyarakat				
	3.1. Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	1 lap	100	1 lap	100
	3.2. Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi	3.17	100	3.22	101
	3.3. Laporan Pengelolaan Konten Web BATAN	1 lap	100	1 lap	100
	3.4. Laporan Pemberitaan Iptek Nuklir melalui antar Lembaga dan Media	1 lap	100	1 lap	100
4.	Dokumen Kerja Sama di Bidang Iptek Nuklir				
	4.1. Dokumen Perjanjian Kerja Sama	1 dok	100	1 dok	100
	4.2. Laporan Pengelolaan Kerja Sama	1 lap	100	1 dok	100
	4.3. Dokumen Kerja Sama IAEA <i>Collaborating Center</i>	1 dok	100	1 dok	90
	4.4. Dokumen Kerja Sama Terkait Pembangunan RDE	1 dok	100	1 dok	100
5.	Dokumen Sistem Keamanan dan Pengamanan Instalasi Nuklir				
	5.1. Dokumen Pengembangan Sistem Keamanan Nuklir	1 dok	100	1 dok	100
	5.2. Dokumen Pengelolaan Instalasi Nuklir	1 dok	100	1 dok	100
	5.3. Dokumen Desain Sistem Proteksi Fisik	1 dok	100	1 dok	100



No	Output/Sub Output/Komponen	Target Tahun 2017		Realisasi Tahun 2017	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
6.	Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran BHHK Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran BHHK	1 lap	100	1 lap	100
7.	Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12 bln	100	12 bln	100

1.2. Anggaran

Pada Tahun 2017 BHHK memperoleh alokasi anggaran (APBN awal) sebesar Rp2.361.912.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Kemudian pada bulan Mei 2017 berdasarkan hasil spending review oleh Biro Perencanaan, BHHK mendapatkan tambahan anggaran untuk pemeliharaan HKI sebesar Rp102.450.000,00 (seratus dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pagu BHHK pada triwulan II meningkat menjadi Rp2.464.362.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pada bulan Mei 2017 BHHK mengajukan revisi anggaran terkait dengan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketanaganukliran (RUUK) dengan BAPETEN dan Kemenristekdikti. Alokasi dana RUUK tersebut diambilkan dari dana kontribusi PUI IAEA sebesar Rp317.200.000,00 dan menyisakan dana kontribusi PUI sebesar Rp350.000.000,00.

Pada bulan Juli 2017, pemerintah mengambil kebijakan berupa efisiensi belanja barang melalui Inpres No. 4 Tahun 2017. Berdasarkan kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya anggaran BHHK sebesar Rp692.267.000,00, sehingga anggaran BHHK (APBNP) menjadi Rp1.772.095.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh lima ribu rupiah). Salah satu dampak terbesar dari kebijakan pemerintah tersebut adalah dipangkasnya seluruh alokasi anggaran kontribusi PUI IAEA.



Berdasarkan data realisasi anggaran pada aplikasi SIPA, realisasi anggaran BHHK tahun 2017 sebesar Rp1.770.793.737,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau mencapai 99.93%. Realisasi anggaran BHHK tahun anggaran 2017 secara rinci disajikan pada Tabel 2.1.2 di bawah ini.

Tabel 2.1.2 Target dan Realisasi Keuangan

No	Output/Sub Output/Komponen	Pagu	Target Tahun 2017		Realisasi Tahun 2017	
			Rupiah (Rp)	%	Rupiah (Rp)	%
3427	Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Humas, Kerja Sama, Pengamanan dan Penyusunan Peraturan Perundangan	1.772.095.000	1.772.095.000	100	1.770.793.737	99,93
001	Dokumen Legal Penunjang Pelaksanaan dan Pendetayagunaan Iptek Nuklir	636.895.000	636.895.000	100	636.837.800	99,99
1.	Naskah Rancangan Usulan HKI Bidang Iptek Nuklir	517.179.000	517.179.000	100	517.178.250	100
2.	Naskah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	84.416.000	84.416.000	100	84.359.550	99,93
3.	Naskah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Clearing House Iptek Nuklir	30.595.000	30.595.000	100	30.595.000	100
4.	Dokumen Persetujuan Etik Penggunaan dan Pemeliharaan Hewan Percobaan	4.705.000	4.705.000	100	4.705.000	100
002	Laporan Layanan Bantuan Hukum	62.326.000	62.326.000	100	62.176.000	99,76
	Laporan Layanan Bantuan Hukum	62.326.000	62.326.000	100	62.176.000	99,76
003	Laporan Layanan Hubungan Masyarakat	232.144.000	232.144.000	100	231.699.275	99,81
1.	Laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	54.467.000	54.467.000	100	54.443.575	99,96
2.	Laporan Pengelolaan Konten WEB BATAN	25.711.000	25.711.000	100	25.711.000	100
3.	Laporan Pemberitaan Iptek Nuklir Melalui Antar Lembaga dan Media	151.966.000	151.966.000	100	151.544.700	99,72



004	Dokumen Kerja Sama di Bidang Iptek Nuklir	131.386.000	131.386.000	100	131.319.714	99,95
1.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	34.257.000	34.257.000	100	34.256.714	100
2.	Laporan Pengelolaan Kerja Sama	62.224.000	62.224.000	100	62.179.000	99,93
3.	Dokumen Kerja Sama IAEA Collaborating Center	16.518.000	16.518.000	100	16.497.000	99,87
4.	Dokumen Kerja Sama Terkait Pembangunan RDE	18.387.000	18.387.000	100	18.387.000	100
005	Dokumen Sistem Keamanan dan Pengamanan Instalasi Nuklir	167.983.000	167.983.000	100	167.818.432	99,9
1.	Dokumen Pengembangan Sistem Keamanan Nuklir	47.098.000	47.098.000	100	47.042.784	99,88
2.	Dokumen Pengelolaan Pengamanan Instalasi Nuklir	102.614.000	102.614.000	100	102.516.648	99,91
3.	Dokumen Desain Sistem Proteksi Fisik Reaktor Daya Eksperimental (RDE)	18.271.000	18.271.000	100	18.259.000	99,93
006	Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran BHHK	491.874.000	491.874.000	100	491.457.012	99,92
.	Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran BHHK	491.874.000	491.874.000	100	491.457.012	99,92
994	Layanan Perkantoran	49.487.000	49.487.000	100	49.485.504	100
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	49.487.000	49.487.000	100	49.485.504	100



1.3. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 dan rencana tindak lanjut BHHK akan diuraikan per output kegiatan di bawah ini.

a. Output 1: Dokumen Legal Penunjang Pelaksanaan dan Pendayagunaan Iptek Nuklir

- 1) Kendala yang dihadapi dalam pemberian layanan penyusunan dokumen legal adalah permintaan pembentukan peraturan Kepala BATAN yang tidak dilengkapi dengan persyaratan pembentukan peraturan.

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja pengusul.

- 2) Kendala yang dihadapi terkait dengan pembayaran pemeliharaan paten adalah kesulitan dalam mengestimasi jumlah anggaran pemeliharaan paten disebabkan adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Hukum dan HAM.

Kendala tersebut diatasi dengan melakukan konsultasi kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham dan meng-*update* informasi tentang ketentuan PP Tarif serta membuat aplikasi penghitungan biaya pemeliharaan paten.

- 3) Kendala yang dihadapi dalam penyusunan naskah konsepsi clearing house adalah BHHK tidak dapat melibatkan pihak-pihak di luar BATAN untuk memberikan masukan. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan anggaran.

Kendala tersebut sudah diatasi dengan cara mengundang pimpinan BATAN untuk memberikan arahan dan menggali informasi tentang keinginan BATAN menjadi lembaga *clearing house*. Usaha lainnya adalah mencari informasi melalui literatur dari lembaga lain yang sudah memiliki *clearing house*.

b. Output 2: Laporan Layanan Bantuan Hukum

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan layanan bantuan hukum adalah jumlah dan jenis kasus hukum yang timbul tidak bisa diprediksi. Hal tersebut akan berdampak pada perencanaan kebutuhan anggaran dan penyusunan agenda kegiatan. Oleh karena itu, perlu dibuat asumsi kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam satu tahun untuk pembiayaan bantuan hukum. Namun apabila tidak ada kasus hukum anggaran tersebut bisa dikembalikan ke negara atau dialihkan untuk membiayai kegiatan lain sehingga tidak mengganggu realisasi capaian anggaran. Selain itu terkait



kegiatan pendokumentasian hukum belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan SDM baik dalam jumlah maupun kompetensi serta sarana dan prasarana dokumentasi hukum yang belum memadai.

Upaya yang telah dilakukan adalah menyampaikan masalah tersebut kepada pimpinan BATAN untuk mendapatkan arahan dalam perencanaan keperluan anggaran layanan bantuan dan dokumentasi hukum.

c. Output 3: Laporan Layanan Hubungan Masyarakat

- 1) Kendala yang dihadapi dalam kegiatan penyediaan informasi melalui hubungan antarlembaga dan media diantaranya adalah kurangnya kesadaran unit kerja terhadap pentingnya publikasi (produk teknologi, fasilitas, jasa, kepakaran, dan kelembagaan) yang dimiliki dan kurangnya kemampuan para personil humas dalam menggali informasi.

Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam upaya memperkaya bahan informasi dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil humas dalam menggali informasi untuk bahan publikasi.

- 2) Kendala yang terkait dengan pengelolaan konten web BATAN adalah masih kurangnya kepedulian unit kerja untuk memperkaya konten web dengan informasi yang dikuasai.

Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi, supervisi, dan koordinasi kepada para penanggung jawab konten web unit kerja, serta mengevaluasi hasil pemutakhiran konten web seluruh unit kerja.

- 3) Kendala yang dihadapi terkait dengan layanan informasi publik adalah pemutakhiran informasi (yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi Pusat) yang belum sepenuhnya dilakukan oleh sebagian besar unit kerja dan belum meratanya kompetensi Petugas Pelayanan Informasi (PPI) dalam memberikan layanan informasi. Selain itu, masih ada keengganan unit kerja dalam mengusulkan daftar informasi yang akan dilakukan uji konsekuensi.

Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan supervisi dan koordinasi layanan informasi di seluruh unit kerja, melakukan peningkatan kompetensi PPI, dan meminta kepada unit kerja untuk menyampaikan usulan daftar informasi yang akan dilakukan uji konsekuensi.



- 4) Kendala yang dihadapi dalam pengukuran IKM adalah jumlah responden untuk mengisi kuesioner IKM masih sedikit dan penyerahan data kuesioner dari unit kerja terlambat.

Upaya yang dilakukan adalah mengintensifkan pemohon informasi yang datang langsung ke BATAN untuk mengisi kuesioner dan mengingatkan kepada pemohon informasi melalui sistem aplikasi untuk mengisi kuesioner.

d. Output 4: Dokumen Kerja Sama di Bidang Iptek Nuklir

- 1) Kendala yang dihadapi dalam membuat perencanaan kerja sama adalah mengidentifikasi jumlah dan jenis kerja sama yang akan direncanakan. Meskipun pada tahun sebelumnya sudah dibuat surat edaran ke unit-unit kerja namun sebagian besar kerja sama yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Kendala lainnya adalah memastikan kerja sama yang dilaksanakan akan dapat terimplementasi secara nyata.

Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kerja Sama (SISKA) yang secara efektif sudah dapat digunakan mulai tahun 2017.

- 2) Kendala dalam pengelolaan kerja sama teknis adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga karena posisi *National Liaison Officer* (NLO) adalah pejabat eselon II, sementara tugas dan tanggung jawabnya harus mengoordinasikan kegiatan tingkat nasional.

Upaya yang dilakukan adalah mengusulkan kepada pimpinan BATAN meningkatkan posisi NLO dijabat minimal oleh pejabat eselon I.

- 3) Kendala dalam pengelolaan IAEA Collaborating Centre adalah kurang optimalnya unit kerja teknis di bawah koordinasi IAEA CC sebagai pelaksana CC. Selain itu kendala yang dihadapi adalah belum dilengkapinya infrastruktur IAEA CC sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan IAEA.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan koordinasi secara intensif dalam peningkatan kompetensi pengelola IAEA CC

- 4) Kendala dalam penyusunan perjanjian kerja sama terkait pembangunan RDE yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah terhadap manfaat dan tujuan pembangunan RDE.

Upaya yang dilakukan adalah audiensi pimpinan BATAN dengan pimpinan pemerintah daerah dan sosialisasi kepada aparat pemerintah daerah di daerah sekitar calon tapak RDE.



e. Output 5: Dokumen Sistem Keamanan dan Pengamanan Instalasi Nuklir

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan dokumen sistem keamanan dan pengamanan instalasi nuklir adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia, baik jumlah maupun kompetensinya dan masih terjadi gangguan keamanan di seluruh kawasan kerja BATAN. Upaya yang dilakukan adalah melibatkan unit kerja dalam tim teknis untuk mendukung kinerja BHHK dalam pengamanan fasilitas dan instalasi nuklir.

f. Output 6: Laporan Dukungan Administrasi Layanan Perkantoran

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan dukungan administrasi layanan perkantoran adalah tidak terlaksananya pembayaran *Peaceful Uses Initiative* (PUI) untuk kegiatan bantuan teknis Indonesia ke IAEA. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemotongan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan adalah mengusulkan kembali anggaran tersebut pada tahun 2018.

Secara umum kendala yang dihadapi BHHK adalah:

1. Keterbatasan SDM baik jumlah maupun kompetensinya
2. Ketidakpastian antara perencanaan dengan realisasi karena adanya kebijakan pemerintah.
3. Sarana ruang kerja yang tidak memadai.
4. Masih terdapat stakeholder BHHK yang belum memenuhi persyaratan sesuai SOP.
5. Munculnya kegiatan yang tidak terencana sehingga belum didukung dengan anggaran yang dibutuhkan, yaitu pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran.



BAB III

KEGIATAN PENDUKUNG DAN HASIL YANG DICAPAI

Dalam rangka mencapai target kinerja yang optimal, BHHK menyelenggarakan kegiatan pendukung selama Tahun 2017, diantaranya sebagai berikut :

1. Workshop Petugas Pelayan Informasi (PPI)
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan para petugas PPI dalam memberikan layanan.
2. Workshop Pemutakhiran Web
Hasil yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam pengelolaan web unit kerja.
3. FGD Kehumasan
Hasil yang dicapai adalah kemampuan Pegawai BATAN dalam memberikan informasi meningkat.
4. Workshop Infografis dan videografis
Hasil yang dicapai adalah tersedianya Pegawai BATAN yang memiliki kemampuan di bidang infografis dan videografis.
5. Sosialisasi Budaya Keamanan Nuklir
Hasil yang dicapai adalah meningkatnya tanggung jawab pegawai BATAN dalam mendukung sistem keamanan nuklir .
6. Sosialisasi Paten
Hasil yang dicapai adalah pegawai BATAN memahami proses pengusulan paten.
7. Lokakarya Etik Penggunaan dan Pemeliharaan Hewan Percobaan
Hasil yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai dibidang etik penggunaan dan pemeliharaan hewan percobaan
8. Workshop pembentukan kader anti narkoba
Hasil yang dicapai adalah peserta mampu menjadi agen anti narkoba di lingkungan BATAN.
9. Penguasaan materi di bidang Keamanan Nuklir
Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kompetensi di bidang keamanan nuklir bagi petugas pengamanan BATAN.
10. Pelatihan menembak
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah Petugas pengamanan terlatih dalam penggunaan senjata api.



11. Sosialisasi Peraturan Kepala BATAN tentang Pedoman Kearsipan dan Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan SOP Penyusutan Arsip

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman pegawai BHHK khususnya Tim Pengelola Arsip dalam melakukan penataan dan penyusutan arsip.

12. *Sharing knowledge*

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai dalam hal pembuatan naskah dinas, pengelolaan PATEN, Pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan pentingnya menyikap Informasi.



BAB IV PENUTUP

Laporan kegiatan BHHK tahun anggaran 2017 dapat disusun dan diselesaikan berkat kerja sama, koordinasi, dan motivasi kerja yang tinggi dari semua pegawai BHHK. Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara umum capaian kegiatan BHHK pada tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan BHHK berkat kerja keras dan manajemen BHHK dalam mengoptimalkan sumberdaya secara efektif dan efisien. Dalam merealisasikan kegiatan terdapat kendala dan hambatan, diantaranya pemotongan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dan faktor lainnya.

Dalam mencapai target kerja yang optimal, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya adalah melakukan penyesuaian kegiatan terhadap alokasi anggaran, membentuk tim kerja dengan melibatkan unit kerja lain, menyelenggarakan pelatihan teknis/bimtek dan meningkatkan koordinasi lebih intensif dengan para pemangku kepentingan.



Lampiran 1. Sumber Daya Manusia

No	Uraian	BHHK	Bag. Hukum	Bag. Humas	Bag. Kerma	Bag. KPN	Jml. Total	Ket.
1.	Menurut Jabatan							
	A. Struktural							
	1. Eselon II	1					1	
	2. Eselon III		1	1	1	1	4	
	3. Eselon IV		3	2	3	2	10	
	B. Fungsional		5	5	1	2	13	
	C. Staf				6	3	9	
	Jumlah	1	9	8	11	8	37	
2.	Menurut Golongan							
	Golongan IV	1	5	2	1	1	10	
	Golongan III		4	6	10	7	27	
	Jumlah	1	9	8	11	8	37	
3.	Menurut Pendidikan							
	S2		2	1	2		5	
	S1/D4	1	7	5	6	4	23	
	Sarmud/D3			2	1	1	4	
	D1					1	1	
	SLTA				2	2	4	
	Jumlah	1	9	8	11	8	37	
4.	Jabatan Fungsional		5	5	1	2	13	
	Jumlah						13	



Lampiran 2. Rekapitulasi Pendidikan Dan Pelatihan

No	Nama	Tempat / Bidang pendidikan	Waktu pendidikan	Biaya / Sponsor
1.	Lia Mariyasih	Jepang Course of site Preparation and Public Relation (SP&PR)	16-20 Januari 2017	Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT)
2.	V. Dewi Koraag, Mely Amalia D.	PDL BATAN Pelatihan Untuk Pelatih : Teknik Mengajar	23 s.d. 27 Jan 2017	PDL BATAN
3.	Suwarno	PDL BATAN Pelatihan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan	20 Feb s.d. 3 Mar 2017	PDL BATAN
4.	Estopet M.D. Sormin	Tokyo FNCA Study panel/International Workshop on "nuclear Liability"	6-10 Maret 2017	IAEA
5.	Wagiman, Gumilang Fuadi, Khundari	PDL BATAN Pelatihan Effective Communication & Collaboration	29 s.d. 30 Maret 2017	PDL BATAN
6.	Fitria Meilina F Lia Mariyasih	PDL BATAN Pengenalan Sistem Manajemen Mutu SB 001 ISO 9001:2016	4 s.d. 6 April 2017	PSMN, PDL BATAN
7.	Jumadiono, Edy Surojo	PDL BATAN Pelatihan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian	6 s.d. 21 April 2017	PDL BATAN
8.	Iwan Heru Purnomo	PDL BATAN Pelatihan Fungsional Pranata Nuklir Keahlian	27 April s.d. 12 Mei 2017	PDL BATAN
9.	Yaziz Hasan	Vienna, Austria Pertemuan Konsultasi INPRO Case Study for the Deployment of a Factory Fuelled Small Modular Nuclear Reactor (SMR)	10 s.d. 13 April 2017	IAEA



No	Nama	Tempat / Bidang pendidikan	Waktu pendidikan	Biaya / Sponsor
10.	Sutrasno	Perancis, IAEA Scientific Visit ke Fasilitas French International Centre Based Research Reactor (ICERR), Saclay dan Cadarache	24 s.d. 27 April 2017	IAEA
11.	V. Dewi Koraag	Hotel Santika-BSD, Bimtek Penyusunan Pemberian Persetujuan Atas Perjanjian Pengalihan Material Penelitian	4 s.d. 5 Mei 2017	-
12.	Wagiman	Sarinah, Jakarta, Legislative Drafting Training Basic Level	8 s.d.10 Mei 2017	Jimly School of Law and Government
13.	Sutrasno	Vienna, Austria, Meeting of TC National Liaison Officers (NLOs) and National Representatives (NRs)	29 Mei s.d. 2 Juni 2017	IAEA
14.	Jumadiono	PPIKSN, Pelatihan Cyber Security	15 s.d.19 Mei 2017	PPIKSN, BAPETEN
15.	Sri Asmoro	Jakarta, Pelatihan Fungsional Pranata Nuklir Keterampilan	24 Juli 2017 s.d. 4 Agustus 2017.	PDL BATAN
16.	Edy Surojo	Beijing, RTC-on Building Capacities for Nuclear Security	14 s.d. 18 Agustus 2017	IAEA
17.	Iwan Heru Purnomo	Vienna, Austria, International Training Course on Nuclear Material Accounting and Control for Nuclear Security at Facilities	21 s.d. 25 Agust 2017	IAEA
18.	Fitria Meilina Fajri, S.H.	Vienna-Austria, Seventh session of the nuclear law institute (NLI)	2 s.d. 13 Oktober 2017	IAEA
19.	Drs. Sutrasno, M.T.	Astana, Kazakhstan, the 18th FNCA Ministerial Level Meeting	10 s.d. 11 Oktober 2017,	Cabinet Office (CAO) Japan
20.	Jumadiono, S.ST, Edy Surojo, S.ST.	Pusdiklantas Polri Tangerang, Pelatihan Menembak	21 Oktober 2017	PT. Sutrado Raya



No	Nama	Tempat / Bidang pendidikan	Waktu pendidikan	Biaya / Sponsor
21.	Jumadiono, S.ST	Beijing –China, RTC- on protection against sabotage of regulated Facilities	6 s.d. 10 November 2017	IAEA
22.	Drs. Yaziz Hasan	Vienna Austria, Technical meeting of the Representatives of states parties to the convention on the physical protection of nuclear material 9CPPNM) and the CPPNM Amendment	9 s.d.10 November 2017	IAEA-uero 800
23.	Iwan Heru Purnomo, S.Si., Mely Amalia Dewi, S.H., Khundari, S.T.	PDL BATAN Pelatihan Analissi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM	13 s.d.15 November 2017	PDL BATAN
24.	Drs. Yaziz Hasan	Vienna-Austria, International Conference on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities	13 s.d. 17 November 2017	IAEA-US 2500
25.	Suwarno	Obninsk-Russian Federation, International training course on the practical operation of physical protection system at nuclear facilities	13 s.d. 24 November 2017	IAEA
26.	Jumadiono, S.ST, Rosmeri br. Ginting	PDL BATAN, Focus Group Discussion (FGD) Jabatan Fungsional Kenukliran	16 s.d. 17 November 2017	PDL BATAN



Lampiran 3. Fasilitas

No	Fasilitas	Jumlah	Kondisi			Status	Ket.
			B	RR	RB		
1.	Ruang kerja	5	✓				
2.	Ruang rapat	1	✓				
3.	Ruang informasi dan media center	1	✓				
4.	Ruang dokumentasi hukum	1	✓				
5.	lemari dan rak informasi	3	✓				
6.	Meja informasi	2 set	✓				
7.	Meja ruang media informasi	1 set	✓				
8.	Meja kerja	56	✓	✓			
9.	Kursi kerja	71	✓	✓			
10.	Kursi lipat	13	✓				
11.	Televisi	2	✓				
12.	Filing kabinet	33	✓	✓			
13.	Lemari besi	24	✓	✓			
14.	Lemari buku	12	✓	✓			
15.	Loker	1	✓				
16.	LCD monitor informasi	3	✓				
17.	LCD Projector	8	✓				
18.	Laptop	27	✓	✓			
19.	PC all in one	23	✓				



No	Fasilitas	Jumlah	Kondisi			Status	Ket.
			B	RR	RB		
20.	PC Desktop	13	✓				
21.	Handycam	4	✓	✓			
22.	Camera digital	16	✓	✓			
23.	Printer Hitam putih	21	✓	✓			
24.	Printer warna	12	✓	✓			
25.	Printer all in one	4	✓				
26.	Digital voice recorder	6	✓	✓			
27.	External hardisk	15	✓				
28.	Mesin ketik elektrik	2	✓		✓		
29.	Mesin ketik manual	1	✓	✓			
30.	Mesin penghancur kertas	3	✓				
31.	Troly	1	✓				
32.	Scanner	10	✓	✓			
33.	Dispenser	1	✓				
34.	Kulkas	1	✓				
35.	Coffee maker	1	✓				
36.	Sepeda motor	5	✓				
37.	Kendaraan roda 4	2	✓				
38.	Tablet	2	✓				
39.	Dry cabinet	1	✓				



Lampiran 4. Keikutsertaan Pegawai dalam Seminar/Semiloka/Lokakarya/Workshop/Sosialisasi

No	Nama Kegiatan	Tempat / Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara	Nama Peserta
1.	Rapat Kerja BATAN Tahun 2017	Kantor Pusat, PSTNT, Bandung, 9 s.d. 10 Mar 2017	BP	Eko Madi, Wagiman, Khundari
2.	Launching dan Sosialisasi Standar BATAN	PSTNT, Bandung, 7 Maret 2017	PSMN BATAN	Khundari
3.	Workshop PPI	PSTNT, Bandung, 23 s.d. 24 Feb 2017	BHHK	Eko Madi, Nani Suryani, Purnomo, Yustantiana, Mirah Yulaili, Jamilah Hanum, Adhi Nugraha, Lia Mariyasih, Siti Erwina
4.	Lokakarya K3 BATAN	PSTA Yogyakarta, 13 s.d. 14 Feb 2017	PSTA, PTKMR, PSMN, PTKRN	V. Dewi Koraag, Purnomo, Haris Sutarta, Khundari, Jumadiono, Iwan Heru P.
5.	Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Penanganan Permasalahan Hukum dan Pelatihan Hukum Kontrak	Balikpapan, 17 s.d 19 Mei 2017	LKPP	Wagiman dan Gumilang Fuadi
6.	Sosialisasi Peraturan Kepala ANRI No. 4 dan 5 Tahun 2017	Kantor Pusat, 22 Mei 2017	BSDMO	Siswati
7.	Workshop Pemutakhiran Web	PSTA, 22 Mei 2017 STTN, 22 Mei 2017 Kantor Pusat, 23 Mei KNS, 26 Mei KNPJ, 24 Mei	BHHK-PPIKSN	Purnomo Yustantiana Adhi Nugraha Mirah Yulaili Budi, Wina
8.	FGD Kehumasan	Kantor Pusat, 27 April 2017	BHHK	Purnomo dkk (Bagian Humas)
9.	Bimtek Internet Sehat dan Aman	PSTA, 26-28 April 2017	PPIKSN	Kunto Adji



No	Nama Kegiatan	Tempat / Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara	Nama Peserta
10.	Sosialisasi Budaya Keamanan Nuklir	PSTA, 21 April 2017	BHHK	Eko Madi P Iwan Heru P. Rosmery G. Sartodikmojo
11.	Sosialisasi Paten	PAIR, 18 April 2017	BHHK	Eko Madi P., Kunto, Estofet, Haris Sutarta, Melly A. D., Fitria Meilina F., Wagiman, Adhi Nugraha, Siswati
12.	Sosialisasi PP 11 Tahun 2017 ttg Manajemen PNS	Kantor Pusat, 2 Mei 2017	BSDMO	Eko Madi P, Haris Sutarta Estofet M.D. Gumilang Fuadi Khundari
13.	Sosialisasi dan Workshop Kepegawaian	Wisma Cipanas, 12-13 April 2017	BSDMO	Khundari, Mahdi Bangun Supto A.
14.	Sosialisasi Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat	Kantor Pusat, 7 April 2017	BSDMO	Mahdi Sartodikmojo T.H. Budi Santoso
15.	Sosialisasi kebijakan strategis pelaksanaan anggaran TA 2017	PSTNT, 4-5 April 2017	BP	Yaziz Hasan, Khundari Siswati
16.	Sosialisasi tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dengan badan pemerintahan	Ditjen Pothan, 12 April 2017	Ditjen Pothan	Nana Suyana KS
17.	FNCA Senior officials meeting	Jepang, 17-21 Juli 2017	Jepang	Eko maadi Parmanto
18.	Workshop on Security Plan	PPIKSN, 28-31 Agustus 2017	Pusdiklat-BATAN	Jumadiono
19.	General Conference IAEA ke 61	vienna-Austria, 14-23 September 2017	IAEA	Eko Madi Parmanto
20.	Pertemuan konsultasi INPRO case Study for the deployment of a factory fuelled small	Vienna-Austria, 25-29 September 2017	IAEA	Yaziz Hasan



No	Nama Kegiatan	Tempat / Waktu Penyelenggaraan	Penyelenggara	Nama Peserta
	modular nuclear reactor (SMR)			
21.	Lokakarya Etik Penggunaan dan Pemeliharaan Hewan Percobaan	Jakarta, 8-Sept-2017 (PAIR)	KEPPHP-BATAN (PAIR-BHHK)	Mely Amalia D, Fitria Meilina Fajri
22.	Workshop Infografis dan videografis	PPIKSN, 7-8 September 2017	BHHK	Purnomo dkk
23.	Workshop roadshow job vacancy	Kantor Pusat, 8 Agustus 2017	BHHK	Ros Intan Purbasari dkk
24.	Workshop performance testing	Bapeten, 12 s.d. 15 September 2017	Bapeten	Edy Surojo
25.	National workshop on communication	Bapeten, 16-19 Oktober 2017	Bapeten	Jumadiono, S.ST
26.	Bimtek dan launching Sistem layanan terpadu melalui media on-line (HELP)	PPIKSN, 25 Oktober 2017	PPIKSN	Khundari, S.T.
27.	Sarasehan Budkes K3	PTBBN, 9 November 2017	Tim Budkes BATAN	Ir. Eko Madi Parmanto, Haris Sutarta, S.H. Rosmeri br. Ginting
28.	Bimtek penilaian kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis	PAIR, 21 November 2018	BU	Siswati
29.	National Workshop on Nuclear Security Measures for Major Public Events	Bapeten, 5 Desember 2017	Bapeten	Jumadiono, S.ST Iwan Heru Purnomo, S.Si.,



Lampiran 5. Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri

No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
1.	KOMUNITAS ILMU PERTAHANAN INDONESIA (KIPI)	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Piagam Kerja Sama antara Kepala BATAN dan Ketua Umum Komunitas Ilmu Pertahanan Indonesia	Baru	MoU
2.	CTBTO	concerning Manado EU-CD VI Peoject	Memorandum of Understanding between Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) and Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Baru	MoU
3.	RS AN NUR YOGYAKARTA	Pengembangan Renograf	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Diseminasi dan Kemitraan-BATAN dan RS Khusus Bedah An Nur Yogyakarta	Baru	PKS
4.	PT. INDUSTRI NUKLIR INDONESIA (PERSERO)	Peningkatan Pemanfaatan Komersialisasi Teknologi Nuklir	Nota Kesepahaman antara BATAN dan PT. Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Baru	MoU
5.	PT. INDUSTRI NUKLIR INDONESIA (PERSERO)	Pemanfaatan aplikasi Isotop dan radiasi	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi-BATAN dan PT. Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Baru	PKS
6.	PT. INDUSTRI NUKLIR INDONESIA (PERSERO)	Pelayanan Jasa Iradiasi Target	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Reaktor Serba Guna -BATAN dan PT. Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Baru	PKS
7.	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyumas	Kesepakatan Bersama antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Baru	MoU
8.	FAKULTAS PETERNAKAN UNIV. PADJAJARAN)	Penelitian dan Pengembangan Iptek nuklir di Bidang Peternakan dan Biokimia	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi-BATAN dan Fak. Peternakan Universitas Padjadjaran	Baru	PKS
9.	Kabupaten Bangka Selatan	Studi Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Kabupaten Bangka Selatan	Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan BATAN	Baru	MoU
10.	PT LEN Industri-UGM-BAPETEN	Pengembangan Radiation Portal Monitor (RPM)	Nota Kesepahaman antara PT LEN Industri (Persero) dan BATAN-dan Univ. Gajah Mada dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Baru	MoU



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
11.	Commissariat a L'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) Perancis	in the Field of Nuclear Science and Technology for Peaceful	Agreement between National Nuclear Energy Agency of Indonesia (BATAN and Commissariat a L'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)	Baru	MoU
12.	International Center based on Research Reactors (ICERR) in Cadarache and Saclay		Agreement for Recieving Affiliate staff to CEA as a Designated International Center Based on Research Reactors, through its Research Centres of Saclay and Cadarache	Baru	MoU
13.	RS. Umum Daerah Ulin Banjarmasin	Pengembangan Renograf, Uji Klinis Thyroid Uptake dan Pencacah Ria	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Diseminasi dan Kemitraan dan Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir dan RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	Baru	PKS
14.	FMIPA Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta	Pengembangan Laboratorium Material Elektronika	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator-BATAN dan FMIPA Universitas Ahmad Dahlan	Baru	PKS
15.	Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta	Pemanfaatan Iptek Nuklir untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan, Penelitian dan Pemanfaatannya kepada Masyarakat	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator-BATAN dan Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto	Baru	PKS
16.	PT LEN Industri-UGM-BAPETEN	Pengembangan Radiation Portal Monitor (RPM)	Nota Kesepahaman antara PT LEN Industri (Persero) dan BATAN-dan Unive Gajah Mada dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Baru	MoU
17.	PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH (SPJT)	Pegembangan Pemanfaatan Iptek Nuklir di Jawa Tengah	Kesepakatan Bersama antara BATAN dan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Baru	MoU
18.	KABUPATEN PURBALINGGA	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Purbalingga	Kesepakatan Bersama antara Badan Tenaga Nuklir Nasional Dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Baru	MoU
19.	PT. PUAN MALAYA	Kemitraan Hasil Litbang BATAN	Perjanjian Kerja Sama antara PDK-BATAN dan PT. Puan Malaya	Baru	PKS
20.	PT. TIMAH	Pemanfaatan Bahan Monasit pada Pilot Plant Pemisahan Uranium , Thorium dan Logam Tanah Jarang di BATAN	Perjanjian Kerja Sama antara PT. Timah (persero) Tbk dan Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir-BATAN	Baru	PKS



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
21.	EB TECH. CO., LTD	Cooperation in Electron Beam Machine Development	Memorandum of Understanding between The National Nuclear Energy Agency of Indonesia (BATAN) and EB Tech Co., Ltd	Baru	MoU
22.	THE GAMMA TECHNICAL CORPORATION (GAMMATECH)	Cooperation in Radiation Portal Monitor & Radiological Real-Time Data Monitoring System Development	Memorandum of Unnderstanding between the National Nuclear Energy Agency of Indonesia (BATAN) and the gamma technical corporation (gammatech)	Baru	MoU
23.	BBPT	Penelitian dan Pemanfaatan Logam Tanah Jarang	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan Tenaga Nuklir Nasional	Baru	PKS
24.	Fakultas Teknik Universitas Indonesia.	Penelitian dan Pengembangan Sistem Pendingin Pasif untuk Manajemen Kecelakaan Reaktor Nuklir Menggunakan Teknologi Heat Pipe.	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir-BATAN dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.	Baru	PKS
25.	Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali.	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buleleng.	Kesepakatan Bersama antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali.	Baru	MoU
26.	Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali dan Universitas Pendidikan Ganesha	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dalam bisang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.	Piagam Kerja Sama antara Kepala BATAN dan Bupati Buleleng, Bali dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.	Baru	MoU
27.	Kementerian Kesehatan	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.	Baru	PKS
28.	Fakultas Biologi Universitas Sudirman	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Biologi Universitas Sudirman.	Baru	PKS



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
29.	Fakultas Farmasi UGM	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Farmasi UGM.	Baru	PKS
30.	Fakultas MIPA-UGM	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas MIPA-UGM.	Baru	PKS
31.	Fakultas MIPA-Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas MIPA-Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha).	Baru	PKS
32.	Fakultas MIPA – UNNES	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas MIPA – UNNES.	Baru	PKS
33.	Fakultas MIPA – UNS	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas MIPA – UNS.	Baru	PKS
34.	Fakultas MIPA-Universitas Sudirman	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas MIPA-Universitas Sudirman.	Baru	PKS
35.	Fakultas MIPA-Universitas Udayana	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas MIPA-Universitas Udayana.	Baru	PKS
36.	Fakultas MIPA-Universitas Negeri Yogyakarta	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas MIPA-Universitas Negeri Yogyakarta.	Baru	PKS
37.	Fakultas Teknik-UGM	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Teknik-UGM.	Baru	PKS



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
38.	Fakultas Teknik-Universitas Negeri Yogyakarta	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Teknik-Universitas Negeri Yogyakarta.	Baru	PKS
39.	Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan-Universitas Sudirman	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan-Universitas Sudirman.	Baru	PKS
40.	Fakultas Sains dan Matematika – Universitas Satya Wacana	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Sains dan Matematika – Universitas Satya Wacana.	Baru	PKS
41.	Fakultas Sains dan Teknologi-UIN Sunan Kalijaga	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Sains dan Teknologi-UIN Sunan Kalijaga.	Baru	PKS
42.	Fakultas Kedokteran – UGM	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Kedokteran – UGM.	Baru	PKS
43.	Fakultas Kedokteran-Universitas Sudirman	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Kedokteran-Universitas Sudirman.	Baru	PKS
44.	Fakultas Kedokteran-Universitas Tanjung Pura	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Fakultas Kedokteran-Universitas Tanjung Pura.	Baru	PKS
45.	Direktorat Riset dan Pengembangan Bisnis PT. Barata Indonesia.	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Direktorat Riset dan Pengembangan Bisnis PT. Barata Indonesia.	Baru	PKS
46.	Direktorat Riset dan Pengembangan Bisnis PT. Kimia Farma	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Direktorat Riset dan Pengembangan Bisnis PT. Kimia Farma.	Baru	PKS



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
47.	Direktorat Riset dan Pengembangan Bisnis PT. Semesta Elterindo Pura	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Direktorat Riset dan Pengembangan Bisnis PT. Semesta Elterindo Pura.	Baru	PKS
48.	Direktorat Sumber Daya Manusia dan Akademik Rumah Sakit UGM	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Akselerator dan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Akademik Rumah Sakit UGM.	Baru	PKS
49.	<i>Nippon Advanced Information Service (NAIS Co., Inc.), 416 Muramatsu, Tokaimura, Ibaraki, ZIP 319-1112, Japan and Consorsium BNCT</i>	Manufaktur dan Standardisasi Komponen Kolimator dan Obat Berbasis Boron Neutron Capture Cancer Therapy (BNCT)".	<i>Memorandum of Agreement for Cooperation on Research into the Health Applications of Particle Accelerator and Research Reactors between Nippon Advanced Information Service (NAIS Co., Inc.), 416 Muramatsu, Tokaimura, Ibaraki, ZIP 319-1112, Japan and Consorsium BNCT.</i>	Baru	MoU
50.	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	Penelitian dan Pengembangan Iptek Nuklir di Sektor Kesehatan.	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi BATAN dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.	Baru	PKS
51.	Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	Penelitian dan Pengembangan Iptek Nuklir di Sektor Pertanian	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi BATAN dengan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng	Baru	PKS
52.	Dinas Perindustrian Kabupaten Buleleng	Tentang Penelitian dan Pengembangan Iptek Nuklir di Sektor Industri	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi BATAN dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Buleleng.	Baru	PKS
53.	Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jend. Achmad Yani	Pendidikan, Penilitan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir di Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT-BATAN) dan Fakultas matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jend. Achmad Yani	Baru	PKS



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
54.	Fakultas Farmasi Universitas Jend. Achmad Yani	Pendidikan, Penilitan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir di Bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT- BATAN) dan Fakultas Farmasi Universitas Jend. Achmad Yani	Baru	PKS
55.	Rektor Universitas Jenderal Akhmad Yani (UNJANI)	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Piagam Kerja Sama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Rektor Universitas Jenderal Akhmad Yani (UNJANI)	Baru	MoU
56.	International Atomic Energy Agency (IAEA)	Designation of the Center for Isotopes and Radiation Application (CIRA), National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia (BATAN) as an "International Atomic Energy Agency Collaborating Centre"	Agreement between the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia (BATAN)	Baru	MoU
57.	Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB)	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Piagam Kerja Sama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB)	Baru	MoU
58.	Rektor Institut Teknologi Indonesia (ITI)	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Piagam Kerja Sama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Rektor Institut Teknologi Indonesia (ITI)	Baru	MoU
59.	Rektor Universitas Tirtayasa (UNTIRTA)	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Piagam Kerja Sama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Rektor Universitas Tirtayasa (UNTIRTA)	Baru	MoU
60.	Rektor Universitas Pertamina	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Piagam Kerja Sama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Rektor Universitas Pertamina	Baru	MoU
61.	Rektor Universitas Pamulang	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Piagam Kerja Sama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Rektor Universitas Pamulang	Baru	MoU



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
62.	Rektor Universitas Prasetiya Mulya	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Piagam Kerja Sama antara Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Rektor Universitas Prasetiya Mulya	Baru	MoU
63.	The Institute of Nuclear and New Energy Technology of Tsinghua University of the People's Republic of China	the China-Indonesia Joint Laboratory on High Temperature Gas-cooled Reactor	Joint Program Agreement between The Institute of Nuclear and New Energy Technology of Tsinghua University of the People's Republic of China and the National Nuclear Energy Agency of the Republic of Indonesia	Baru	MoU
64.	B2TKE-BPPT, P2K-LIPI, FT-UI, FMIPA-IPB, FMIPA-ITB, FTI-Univ Pertamina, STEM-Prasetiya Mulya, LP3M-ITI, FT-Univ. Pamulang, Dir. Produksi PT. INUKI.	Penelitian dan pengembangan High Temperature Gas-Cooled Reactor (HTGR) Indonesia	Konsorsium antara PTKRN, B2TKE-BPPT, P2K-LIPI, FT-UI, FMIPA-IPB, FMIPA-ITB, FTI-Univ Pertamina, STEM-Prasetiya Mulya, LP3M-ITI, FT- Univ. Pamulang, Dir. Produksi PT. INUKI.	Baru	MoU
65.	UNIVERSITAS GAJAHMADA	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Nota Kesepahaman Bersama antara Kepala BATAN dan Rektor Universitas Gajahmada	Baru	MoU
66.	UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Piagam Kerja Sama antara Kepala BATAN dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	Baru	MoU
67.	UNIVERSITAS HASANUDDIN	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Piagam Kerja Sama antara Kepala BATAN dan Rektor Universitas Hasanuddin	Baru	MoU
68.	PEMERINTAH PROVINSI NTB	Penelitian, Pengembangan, Perencanaan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir di Provinsi NTB	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan BATAN	Baru	MoU
69.	PT. SANG HYANG SERI	Pertanian dan penyebarluasan benih bermutu dari varietas unggul produk BATAN dan produk lain di bidang pertanian	Nota Kesepahaman antara Dep. Bid. PTN-BATAN dan Dirut. PT. Sang Hyang seri	Baru	MoU



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
70.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Piagam Kerja Sama antara Kepala BATAN dan Rektor Universitas Islam Gunung Djati di bidang	Baru	MoU
71.	FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI	Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir di Bidang Sains dan Teknologi	Perjanjian Kerja Sama antara PSTNT-BATAN dan Faklutas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung	Baru	PKS
72.	PT. KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk	Alih Teknologi Produksi Radiofarmaka	Perjanjian Kerja Sama antara PTRR-BATAN dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk	Baru	PKS
73.	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ESDM	Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Logam Tanah Jarang Hidroksida dan Ikutannya dari Monasit untuk Pilot Plant Gadolinium Oksida di Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dan PTBGN	Baru	PKS
74.	FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS UNIVERSITAS NASIONAL	Penelitian, pengembangan dan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir	Perjanjian Kerja Sama antara PSTA-BATAN dan fakultas Teknik dan Sains Universitas Nasional	Baru	PKS
75.	PT. KEBON AGUNG	Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Sifat Agronomis Tanaman Tebu	Nota Kesepahaman antara PT. Kebon Agung dan PAIR-BATAN	Baru	MoU
76.	PEMPROV. SUMATERA BARAT	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nuklir di Provinsi Sumatera Barat	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Sumatera Barat dengan BATAN	Baru	MoU
77.	PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH	Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nuklir di Kota Payakumbuh	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan BATAN	Baru	MoU
78.	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir	Perjanjian Kerja Sama antara PTKRN-BATAN dan Fak. Teknik Universitas Sriwijaya	Baru	PKS



No	Mitra Kerja Sama	Bidang	Hasil	Status	Ket.
79.	PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI	Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek Nuklir dalam Menunjang Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci	Nota Kesepakatan antara BATAN dan Pemerintah Kabupaten Kerinci	Baru	MoU
80.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. KERINCI, DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Kab. Kerinci	Perjanjian Kerja Sama antara PAIR-BATAN dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Kerinci dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Kerinci	Baru	PKS
81.	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Piagam Kerja Sama antara Kepala BATAN dan Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Baru	MoU
82.	CHINA NATIONAL ENERGY ADMINISTRATION	<i>the Field of Research and Development on Peaceful Uses of Nuclear Energy</i>	<i>Memorandum of Understanding between Indonesia National Nuclear Energy Agency and China National Energy Administration</i>	Baru	MoU



Lampiran 6. Pegawai Yang Memperoleh Penghargaan

No.	Nama	Jabatan	Jasa	Tanda Penghargaan Yang Diterima
1.	Haris Sutarta, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	-	Pegawai teladan TW. I Tahun 2017
2.	Lia Mariyasih, S.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	-	Pegawai teladan TW. II Tahun 2017
3.	Dirgahary Tamara, M.Si	Analisis Kerja Sama	-	Pegawai teladan TW. III Tahun 2017
4.	-	-	-	Pegawai teladan TW. IV Tahun 2017



Lampiran 7. Usulan HKI Terdaftar Tahun 2017

No	Judul/Inventor	Tanggal Pendaftaran	Jenis/ Nomor Permohonan	Keterangan
1.	KOLIMATOR NEUTRON BERBASIS REAKSI D-D PADA COMPACT NEUTRON GENERATOR DAN PROSES PEMBUATANNYA Prof. Yohannes Sardjono (PSTA)	10-2-2017	Paten P.00201700949	Terdaftar
2.	KOLIMATOR NEUTRON BERBASIS REAKSI D-T PADA COMPACT NEUTRON GENERATOR DAN PROSES PEMBUATANNYA Prof. Yohannes Sardjono (PSTA)	10-2-2017	Paten P.00201700950	Terdaftar
3.	ELEKTROKOAGULATOR UNTUK PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM BRBASIS MINERAL Ir. Prayitno, MT, APU (PSTA)	7-3-2017	Paten P.00201701785	Terdaftar
4.	APLIKASI TEKNIK SERANGGA MANDUL PADA PENGENDALIAN PENYAKIT DBD Drs. Ali Rahayu (PAIR)	29-5-2017	Paten P.00201703379	Terdaftar
5.	SENYAWA NANO PARTIKEL EMAS BERTANDA $^{198}\text{AuNP}$ -PAMAM DENDRIMER DAN PROSES PEMBUATANNYA Anung Pujiyanto, S.Si (PTRR)	8-6-2017	Paten Sederhana S.00201703639	Terdaftar
6.	REAKTOR NUKLIR KOGENERASI TIPE <i>PEBBLE BED HIGH TEMPERATURE GAS-COOLED REACTOR</i> 10MWt Dr. Topan Setiadipura (PTKRN)	19-9-2017	Paten P.00201706282	Terdaftar
7.	BAHAN PENYERAP GELOMBANG MIKRO DAN PROSES PEMBUATANNYA Dr. Wisnu Ari Adi, M.Si (PSTBM)	6-10-2017	Paten P.00201706851	terdaftar
8.	KOLIMATOR NEUTRON PADA LINEAR ACCELERATOR UNTUK BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY DAN PROSES PEMBUATANNYA Prof. Yohannes Sardjono, APU (PSTA)	24-10-2017	Paten P.00201707368	Terdaftar (biaya PSTA)
9.	KOLIMATOR NEUTRON PADA CALIFORNIUM-252 UNTUK BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY DAN PROSES PEMBUATANNYA Prof. Yohannes Sardjono, APU (PSTA)	24-10-2017	Paten P.00201707366	Terdaftar (biaya PSTA)
10.	Baterai Padat isi Ulang Berbasis Elektrolit Padat Prof. Dr. Rer.nat. Evvy Kartini (PSTBM)	21-12-2017	Paten P00201709362	Terdaftar (biaya PSTBM)



Lampiran 8. Daftar Sertifikat Paten Terbayar (Paten Granted)

No	Judul	Inventor	Nomor Paten	Nomor Sertifikat Paten
1.	Alat Analisis Partikel Untuk Pengamatan Perilaku Partikel	Dr. Eko Pujadi	P.00201000917	IDP000043243
2.	Sistem Deteksi Bahan Peledak dan Narkoba Menggunakan Generator Neutron (PSTA)	Prof. Drs. Darsono, M.Sc	P.00201100588	IDP000043250;
3.	Proses Pembuatan Hidrogel Superabsorben Cepat Menggembung Berbasis Pati dengan Teknologi Radiasi (PAIR)	Erizal, dkk	P00201100401,	IDP000043615
4.	Bata Tahan Api Untuk Tungku Pembakar Sampah Radioaktif Berbentuk Silinder dengan Bahan Utama Pasir Abu Batu (PSTNT)	Ir. Henky Poedjo R.	P.00201200408	IDP000045556
5.	Resin Media Pendar untuk Film Sintilator Dosimetri dan Proses Pembuatannya, (PSTBM)	Drs. Jadigia Ginting	P.00201300402	IDP000043110
6.	Metode Penentuan Kapasitas Akumulasi Radionuklida dari Tanah oleh Tanaman (PSTNT)	Dr. Poppy Intan Tjahaja dan Putu Sukma Buana	P.00201100656	IDP000044448
7.	Hidrogel Adsorben Berbasis Kitosan dan Proses Pembuatannya dengan Teknologi Radiasi (PAIR)	Drs. Erizal	P.00201200411	IDP000043806
8.	Peningkatan Indeks Viskositas Pelumas dari Kopolimer Radiasi Lateks Karet Alam Metil Metakrilat dan Proses Pembuatannya (PAIR)	Dr. Meri Suhartini	P00201000819	IDP000045586
9.	Proses Pembuatan Oligoalginat Sebagai Zat Pengatur Tumbuh Organik Dengan Teknologi Radiasi (PAIR)	Tita Puspitasari, M.Si,	P00201000458	IDP000045587



No	Judul	Inventor	Nomor Paten	Nomor Sertifikat Paten
10.	Proses Pemisahan Itrium (Y) dari Pasir Senotim dengan Metoda Asam Sulfat dan Ekstraktan Organo Fosfor D2EHPA (PSTA),	Prof. Dwi Biyantoro	P.00201100589	ID P000047258
11.	Proses Pembuatan Lapisan Tipis Si/SiB/SiP/Au untuk Komponen Utama Detektor Nuklir Surface Barrier (PSTA)	Prof. Tri Mardji	P00201201103	IDP000047788
12.	Proses Pembuatan Bahan Hibrida Magnetostriktif Dengan Metode Raduksi-Difusi (PSTBM)	Dr. Maria Immaculata Maya Febri	P00200100566	IDP000047884



Lampiran 9. Pegawai Yang Melanjutkan Program Pendidikan S2 Dalam Negeri

No.	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Peserta			Sponsor	Status
			Jangka waktu	Nama	Bidang		
1.	S2	UI	01-Sept-2014 s.d. 31-Agust-2016	Dirgahary Tamara	Ilmu Hubungan Internasional	DIPA Pusdiklat	Perpanjangan 1-Sept-2016 s.d. 28-Feb-2017

